

# Studi Komparatif Sistem Administrasi Publik: Analisis Efektivitas Birokrasi Di Jepang Dan Indonesia

Erinaldi\*, Arifianda Cakrawinata, Chely Aninthya, Jingga Lini Feburinta

STIA Lancang Kuning Kota Dumai

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan e-government di Indonesia dan Jepang, dengan fokus pada penentuan perbedaan paling mencolok dalam metodologi, kemajuan, dan hambatan yang dihadapi kedua negara saat ini. Metode penelitian kualitatif digunakan, dan data dikumpulkan melalui kajian literatur yang relevan dari berbagai jurnal dan artikel yang berkaitan dengan subjek ini. Negara-negara seperti Indonesia dan Jepang telah secara progresif meningkatkan kerangka kerja e-government mereka sebagai respons terhadap integrasi global dan kemajuan teknologi informasi. Sistem ini berorientasi bagi penguatan efisiensi, kemudahan, serta transparansi pemerintah. Konsep pemerintahan elektronik merupakan suatu terobosan teknologi yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk menyederhanakan layanan dan berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat melalui internet atau jejaring sosial, yang bertautan dengan isu yang dikelola pemerintah. Jepang memiliki jejaring teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat kuat, dibuktikan dengan banyaknya individu yang menggunakan ponsel pintar dan akses internet yang sangat baik. Di sisi lain, Indonesia terus menghadapi tantangan dalam memaksimalkan akses internet dan pemerataan teknologi informasi dan komunikasi di zona perdesaan.

**Kata Kunci:** Pemerintahan Elektronik; Indonesia; Jepang

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i2.467>

\*Correspondence: Erinaldi

Email:

[erinaldipratama2905@gmail.com](mailto:erinaldipratama2905@gmail.com)

Received: 14-03-2026

Accepted: 14-04-2026

Published: 14-05-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to explore the similarities and differences in the implementation of e-government in Indonesia and Japan, with a focus on identifying the most notable differences in methodology, progress, and the challenges currently faced by both countries. A qualitative research method was employed, and data were collected through a review of relevant literature from various journals and articles related to this subject. Countries such as Indonesia and Japan have progressively enhanced their e-government frameworks in response to global integration and advancements in information technology. These systems are designed to strengthen government efficiency, convenience, and transparency. The concept of e-government represents a technological breakthrough implemented by governments to simplify services and serve as a means of conveying information to the public via the internet or social media, addressing issues managed by the government. Japan possesses a highly robust information and communication technology (ICT) infrastructure, evidenced by the high number of individuals using smartphones and excellent internet access. On the other hand, Indonesia continues to face challenges in maximizing internet access and ensuring equitable distribution of information and communication technology in rural area.

**Keywords:** E-government; Indonesia; Jepang

## Pendahuluan

Di era modern, teknologi berperan sebagai katalisator utama dalam transformasi dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Sejak dekade 1990-an, sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Singapura dan Australia telah memelopori integrasi sistem elektronik ke dalam struktur pemerintahan. Adopsi teknologi informasi dalam ranah birokrasi ini bertujuan untuk menjamin penyampaian informasi yang lebih akurat, ringkas, dan mudah diakses oleh publik, sekaligus menandai pergeseran pemanfaatan teknologi di berbagai sektor strategis. Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas melalui digitalisasi merupakan instrumen utama bagi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di era modern (Firdausijah & Priatna, 2020)

Integrasi teknologi digital saat ini memungkinkan akses layanan publik dan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dilakukan secara tanpa batas. Model komunikasi tradisional yang terbatas pada kehadiran fisik dan jam kerja kini dianggap tidak lagi memadai. Kehadiran teknologi informasi telah mengubah paradigma layanan publik dari fasilitas privat menjadi fasilitas umum yang lebih inklusif. Hal ini juga mendorong masyarakat, sebagai pemangku kepentingan, untuk menjadi lebih kritis dan kompetitif dalam menuntut peningkatan kualitas layanan birokrasi (Saputra & Infrastructure, 2020). Menghadapi arus globalisasi dan pesatnya transformasi teknologi informasi, Indonesia dan Jepang sudah menorehkan langkah besar dalam mengimplementasikan sistem *e-government*. Inisiatif ini difokuskan untuk mengoptimalkan efektivitas birokrasi, memperluas jangkauan akses layanan, serta memperkuat transparansi dalam tata kelola pemerintahan kedua negara.

Menurut (Ramadhan et al., 2019) *E-government* didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi mencakup Wide Area Networks, internet, hingga mobile computing oleh jajaran instansi pemerintah. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk mentransformasi pola interaksi antara pemerintah dengan warga, sektor swasta, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Penerapan *e-government* mengoptimalkan penggunaan internet untuk menjalankan operasional birokrasi serta memberikan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dinamika ini menuntut pemerintah untuk terus beradaptasi dan melakukan transformasi secara berkesinambungan seiring dengan pesatnya transformasi teknologi informasi dan komunikasi. Sangat utama untuk melihat kecepatan eksekusi *e-government* di Indonesia yang menunjukkan tren pertumbuhan signifikan dibandingkan fase awal kemunculannya. Pemerintah elektronik telah terbukti menjadi mekanisme paling efisien dalam memfasilitasi interaksi antara birokrasi dengan masyarakat, sektor swasta, maupun hubungan antarlembaga pemerintah. Fokus utama

dari digitalisasi ini adalah untuk mengoptimalkan efektivitas, kenyamanan pengguna, serta jangkauan aksesibilitas layanan publik secara menyeluruh.

Implementasi *e-government* kini telah menjadi prioritas strategis bagi berbagai negara di dunia. Menurut (Agung & Satia, 2020) integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi operasional harian publik telah memicu transformasi fundamental pada kerangka kerja, nilai sosial, dan model bisnis masyarakat. Globalisasi digital ini bertujuan untuk menekan biaya operasional, mengoptimalkan pelayanan publik, serta memacu produktivitas di level lokal hingga global. Urgensi fenomena ini terlihat dari data PBB, di mana 179 dari 192 negara anggotanya telah mengadopsi sistem pemerintahan elektronik. Laporan terbaru PBB menekankan bahwa transformasi digital bukan sekadar pilihan teknologi, melainkan keharusan untuk mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan dan daya saing antar negara. Lebih dari sekadar alat efisiensi biaya, *e-government* merupakan instrumen perubahan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan modern. Implementasi *e-government* telah menjadi instrumen krusial dalam transformasi administrasi publik di berbagai belahan dunia.

Penelitian ini secara khusus berfokus pada implementasi e-government dalam sistem administrasi publik dengan objek kajian berupa perbandingan antara Indonesia dan Jepang. Permasalahan spesifik yang diangkat adalah masih belum optimalnya efektivitas penerapan e-government di Indonesia dibandingkan dengan Jepang, yang ditandai oleh keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya pemerataan akses digital terutama di wilayah perdesaan, serta kompleksitas birokrasi yang berdampak pada kualitas pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan dalam konteks komparatif antar negara, yaitu Indonesia sebagai representasi negara berkembang dan Jepang sebagai negara maju dengan tingkat kematangan digital yang lebih tinggi. Adapun celah penelitian terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara komprehensif membandingkan implementasi e-government dari perspektif efektivitas birokrasi, kesiapan infrastruktur, serta kualitas tata kelola pemerintahan. Studi-studi sebelumnya cenderung bersifat deskriptif dan belum mampu mengungkap secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tingkat keberhasilan antara kedua negara tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara komparatif faktor-faktor penentu keberhasilan dan hambatan implementasi e-government di Indonesia dan Jepang.

Dinamisnya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara berarti telah memengaruhi pola kehidupan masyarakat dan menuntut pemerintah untuk beradaptasi. Melalui sistem ini, lembaga negara dan pemerintah daerah dapat menjamin akses informasi yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Inovasi layanan

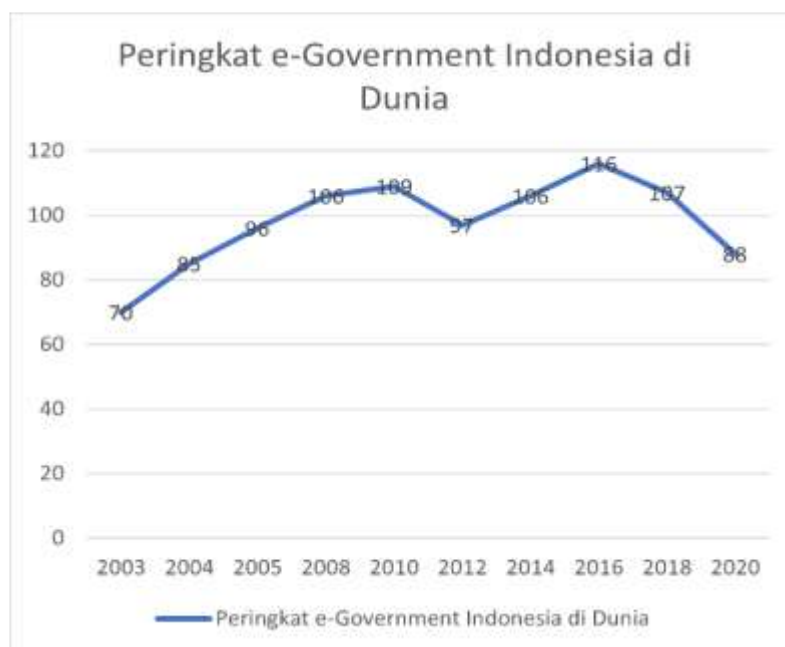
berbasis digital ini dikembangkan secara sistematis untuk meningkatkan kepuasan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih berkualitas, efektif, serta efisien dari aspek waktu dan anggaran. Praktik *e-government* kini digunakan secara menyeluruh oleh berbagai negara, termasuk Indonesia serta Jepang, tidak sekadar sebagai perangkat teknologi, melainkan juga sebagai kerangka kebijakan dan tata kelola yang fundamental. Namun, dalam konteks domestik, perjalanan pemerintahan elektronik di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. (Khoiriyanti & Rachman, n.d.) menyoroti bahwa meskipun terdapat perkembangan, akselerasi implementasi *e-government* di Indonesia masih tertinggal dan belum mencapai target yang direncanakan. Menurut (Ode Muhammad Ichwan Sjachrawy et al., 2025) Reformasi birokrasi di negara berkembang sering kali terbentur pada resistensi budaya organisasi yang masih kaku terhadap transparansi yang dibawa oleh sistem elektronik, terutama jika dibandingkan dengan kemajuan pesat negara-negara lain di kawasan regional.

Transformasi layanan publik oleh instansi pemerintah harus berpijak pada evaluasi atas berbagai kritik terkait kualitas pelayanan selama ini. Secara historis, birokrasi sering kali dinilai kurang optimal dalam menyelenggarakan layanan dasar. Hal ini terlihat dari kompleksitas prosedur dalam pengurusan dokumen seperti KTP, SIM, dan IMB, serta hambatan dalam mengakses pendidikan berkualitas maupun layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat luas. Pengalaman masa lalu ini menjadi urgensi bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan fundamental dalam sistem penyediaan layanan publik (Amalia, 2018).

Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi di instansi penyedia layanan publik, yang sering kali memicu mekanisme birokrasi yang sangat lambat dan modal yang sangat berat. Sebagai negara berkembang yang besar, Indonesia perlu menyadari urgensi mutlak dalam menghadirkan pelayanan publik yang kompeten, profesional, dan berkualitas tinggi guna memenuhi standar kebutuhan masyarakat modern.

Di era informasi, dinamika hubungan antara negara, pasar, dan warga negara menghadapi tantangan besar dalam sektor pelayanan publik. Secara historis, negara cenderung memosisikan diri sebagai aktor dominan, namun model pelayanan konvensional saat ini mulai mendapatkan penolakan dari sektor pasar maupun masyarakat. Rendahnya kualitas komunikasi aparat serta pola pelayanan yang tidak inklusif dan cenderung berpihak pada kelompok tertentu memicu ketidakpuasan publik yang luas. Seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat, kritik terhadap manajemen layanan publik semakin meningkat sebagai upaya untuk mendorong transparansi, efektivitas komunikasi, dan pemerataan akses bagi seluruh lapisan warga negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan pelaksanaan e-government antara Indonesia dan Jepang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang mempengaruhi keberhasilan dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Fokus penelitian ini adalah pada sistem e-government dalam konteks administrasi publik untuk kedua negara, dengan perhatian khusus pada aspek birokrasi, infrastruktur teknologi informasi, serta pengelolaan pemerintahan. Diharapkan kontribusi dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perbedaan dalam tingkat keberhasilan penerapan e-government antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju, serta menjadi sumber rujukan akademis dan praktis dalam mendukung upaya reformasi birokrasi dan penguatan pengelolaan pemerintahan yang berbasis digital di Indonesia.



**Gambar 1.** United Nations (UN) e-government Survey 2020  
(Sumber: UN *e-government* Survey)

Grafik tersebut mengonfirmasi bahwa Indonesia ada di jajaran ke-88 dalam hal pengembangan dan implementasi *e-government* atau sistem SPBE, menurut *e-government* Survey 2020 PBB. Peringkat 2020, yang dipublikasi pada bulan Juli, mencerminkan kenaikan 19 jenjang dari 2018 dan 2016, sewaktu mereka berada di peringkat 107 dan 116 masing-masing.

Secara teoritis, kematangan e-government diukur melalui empat tahapan, mulai dari sekadar penyediaan informasi (katalog) hingga integrasi penuh antarlembaga yang memungkinkan transaksi lintas sector (Layne & Lee, 2001). Konsep *e-government* terbagi

ke dalam beberapa klasifikasi interaksi utama. Pertama, Government to Citizen (G2C), yang menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi berbasis internet dan perangkat komputer untuk mengoptimalkan saluran komunikasi serta kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kedua, Government to Government (G2G), yang mencakup pola kemitraan dan koordinasi antarlembaga pemerintah, baik di tingkat pusat, negara bagian, maupun daerah. Terakhir, Government to Business (G2B), yang merepresentasikan hubungan transaksional dan interaksi formal antara berbagai tingkatan pemerintah dengan sektor dunia usaha.

Secara konseptual, *e-government* didefinisikan sebagai aplikasi teknologi informasi oleh instansi pemerintah melalui media seperti internet, jaringan area luas (WAN), serta komputasi seluler yang mampu merevolusi pola interaksi dengan masyarakat, sektor swasta, maupun lembaga pemerintahan lainnya. Pada intinya, praktik ini mencakup segala bentuk optimalisasi TIK yang ditujukan untuk memperkuat aksesibilitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Berbagai definisi di atas bermuara pada premis yang selaras: *e-government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi oleh birokrasi untuk mempererat sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam bingkai good governance. Fokus utamanya adalah optimalisasi kualitas serta efisiensi pelayanan publik bagi masyarakat dan sektor bisnis. Dalam perkembangannya, istilah administrasi elektronik (e-administration) sering kali digunakan secara bergantian dengan *e-government*, di mana keduanya merepresentasikan integrasi TIK dalam tata kelola publik. Sebelum diadopsi secara luas di instansi pemerintah, konsep administrasi elektronik ini terlebih dahulu berkembang melalui ekosistem e-business, e-commerce, dan pasar elektronik (Kasus et al., 2020).

Integrasi teknologi dalam sektor publik, atau yang dikenal sebagai *e-government*, kini telah menjadi standar global yang fundamental. Kehadiran sistem pemerintahan elektronik yang kredibel dipandang sebagai solusi strategis untuk mereformasi prosedur birokrasi konvensional yang cenderung birokratis, memakan biaya tinggi, serta memiliki celah kerawanan terhadap praktik korupsi. Dengan mengadopsi sistem yang andal, efisiensi operasional pemerintah dapat ditingkatkan secara signifikan (Nurlukman, 2017)

Tata kelola pemerintahan yang masih bersifat konvensional sering kali terjebak dalam pola manajemen yang sentralistik, bersifat *top-down*, dan cenderung monopolistik. Kondisi ini memicu fenomena penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh aparatur negara yang berorientasi pada kepentingan pribadi (*self-oriented*), sehingga menciptakan inefisiensi birokrasi yang mengabaikan aspirasi masyarakat. Patologi birokrasi semacam ini pada akhirnya menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sebagaimana diungkapkan oleh Barzelay (1982) dalam "Breaking Through Bureaucracy",

pola interaksi yang buruk antara pemerintah, sektor swasta, dan warga negara mengakibatkan krisis kepercayaan publik. Masyarakat merasa jenuh dan apatis terhadap kerumitan birokrasi yang lamban dan tidak responsif terhadap kebutuhan mereka. Pada banyak negara berkembang, sektor publik sering kali terjebak dalam praktik birokrasi yang koruptif dan kurang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Karakteristik birokrasi yang cenderung kaku dan formalistis ini dinilai tidak lagi relevan dalam menangani dinamika persoalan publik yang semakin kompleks. Namun, integrasi inovasi teknologi saat ini membawa paradigma baru bagi tata kelola di negara berkembang. Terdapat ekspektasi besar terhadap transformasi birokrasi yang lebih produktif dan efisien, di mana keterbukaan akses informasi serta jaminan keamanan menjadi pilar utama dalam menciptakan tatanan masyarakat yang berbasis pada kemajuan teknologi.

Osborne dan Gaebler (1992) mengidentifikasi bahwa inefisiensi manajemen merupakan sumber utama kegagalan pemerintah dalam memperoleh validasi publik. Masalah sistemik sering kali berakar pada perilaku administratif daripada fungsinya. Dalam konteks ini, membiarkan kebuntuan birokrasi tanpa perbaikan nyata hanya akan mempercepat keruntuhan tatanan pemerintahan. Oleh karena itu, prinsip ekonomi birokrasi yang diusulkan oleh Osborne dan Plastrik (1996) menjadi relevan; yakni menciptakan struktur yang minimalis namun memiliki dampak maksimal (efektif dan efisien). Hal ini mencakup transformasi kemampuan aparatur dalam menjalankan fungsi layanan publik, mengelola sumber daya anggaran secara akuntabel, serta menjadi fasilitator dalam setiap tahapan pengembangan sosial kemasyarakatan.

Internet memegang peranan krusial dalam menentukan arah masa depan inisiatif pemerintahan digital, di mana Teknologi Informasi (TI) berfungsi sebagai fondasi utama operasionalnya. Dalam ekosistem layanan publik modern, internet merupakan tulang punggung yang mengintegrasikan berbagai fungsi pemerintahan. Di Indonesia, implementasi nyata dari konsep ini terlihat melalui standarisasi situs web pemerintah daerah yang berfungsi sebagai portal layanan publik elektronik. Mengingat karakteristik portal tersebut yang sangat interaktif dan membutuhkan pembaruan berkala, ketersediaan infrastruktur yang adaptif menjadi prasyarat mutlak. Percepatan pengembangan teknologi diharapkan menjadi solusi ideal dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Meski begitu, faktor kesiapan kelembagaan serta rendahnya kualitas infrastruktur penunjang sering kali menjadi hambatan, sehingga masyarakat belum sepenuhnya siap untuk mengadopsi teknologi mutakhir secara optimal.

Efektivitas implementasi *e-government* di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, khususnya dalam mengintegrasikan layanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkelanjutan. Proses transisi digital ini terhambat oleh berbagai faktor

sistemik, mulai dari stagnasi pada fase pembangunan infrastruktur, rendahnya kualitas pemutakhiran data, hingga tata kelola aplikasi pemerintah yang belum optimal. Kesenjangan infrastruktur TIK antara wilayah perkotaan dan perdesaan menjadi faktor determinan yang menghambat inklusivitas layanan publik digital di Indonesia (CHESSYA TIVANI WIJAYA, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan dampak transformasi digital sering kali tidak dirasakan secara signifikan oleh masyarakat, sehingga perbedaan kualitas layanan antara era konvensional dan era digital menjadi tidak terlihat. Selain itu, keterbatasan dukungan teknis internal menjadi kendala krusial ketika ekspektasi terhadap digitalisasi tidak dibarengi dengan daya dukung perangkat dan infrastruktur TI yang memadai (Ayu et al., 2022).

Integrasi teknologi informasi ke dalam ranah administrasi dan birokrasi telah membawa kontribusi penting bagi kenaikan standar hidup masyarakat secara umum. Di negara-negara mapan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diposisikan sebagai elemen fundamental bagi penguatan *e-government*, yang bertujuan mengoptimalkan standar pelayanan bagi individu maupun sektor swasta, sekaligus merasionalisasi struktur organisasi internal dalam perangkat administratif. Implementasi TI, terutama internet, telah merevolusi pola distribusi informasi serta mekanisme komunikasi menjadi lebih akseleratif, praktis, dan ekonomis tanpa terhambat oleh batasan ruang maupun waktu. Fenomena ini menandai masifnya penetrasi internet ke dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk transformasi pada sektor pemerintahan.

Jepang disetujui secara total sebagai suatu bagian dari negara dengan implementasi sistem pemerintahan elektronik yang sangat unggul. Keberhasilan ini tidak terlepas dari posisi strategis Jepang sebagai negara maju yang memiliki fondasi tata kelola pemerintahan yang mapan dan mutakhir. Dibandingkan dengan berbagai negara di kawasan Asia maupun dunia, Jepang menunjukkan keunggulan kompetitif yang signifikan, terutama dalam keahlian dan pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Keunggulan Jepang dalam administrasi digital berakar pada konsistensi kebijakan jangka panjang yang memprioritaskan konektivitas high-speed sebagai hak dasar warga negara (Caplanova & Dimelis, 2025). Keunggulan infrastruktur digitalnya tercermin dalam data Speedtest Global Index terbaru, yang mencatatkan rata-rata kecepatan internet di Jepang mencapai 47,8 Mbps. Angka tersebut melampaui rata-rata kecepatan global dengan margin sekitar 170 persen, yang memberikan dukungan krusial bagi kelancaran operasional layanan publik berbasis digital.

Dalam sejarah administrasi Jepang terdapat tiga era yang berbeda, seperti ulasan dari pihak Berman, Moon, dan Choi (dalam Abdul, 2020), yakni tahap birokrasi pra-modern, pemerintah Jepang pada sebelum perang, serta pemerintah Jepang setelah perang. Era

birokrasi pra-modern ditandai oleh sistem Tokugawa Shogunate, yang bersifat sangat feodal dan terdesentralisasi, serta mengendalikan cabang eksekutif dan struktur pemerintahan pada masa itu. Lebih lanjut, cabang administrasi serta eksekutif di Jepang memegang fungsi yang sangat bermakna.

Ada tiga nilai utama yang mendasari sistem administrasi Jepang. Pertama, nilai legalitas atau *setchi ho*, yaitu aturan bahwa sistem hukum sekadar tampak ketika sektor swasta negara / USN diizinkan oleh ketentuan hukum. Dengan otorisasi ini juga berarti sektor swasta negara/USN berkewajiban untuk menegakkan, serta mematuhi hukum, terutama dalam kaitannya dengan hukum ASN. Kedua, konsep moderasi, yaitu keseimbangan antara politisi dan birokrat, di mana keduanya harus bertindak secara bertanggung jawab namun tidak egois, serta siap melampaui kepentingan sektoral mereka demi kepentingan masyarakat. Ketiga, merujuk pada dokumen-dokumen Jepang yang paling kredibel, hierarki menjadi elemen krusial dalam alur penetapan keputusan administratif maupun politik secara luas, khususnya dalam hal penyampaian informasi dan penetapan kebijakan.

Faktor utama Jepang diakui sebagai salah satu dari bangsa maju di dunia yakni berkat adanya pola administrasi publik dan birokrasi yang sangat kuat serta tersusun rapi. Pemanfaatan TIK yang matang di Jepang telah menciptakan budaya transparansi yang secara otomatis mempersempit peluang terjadinya malpraktik administrasi (Bertot et al., 2010). Kemenangan administrasi publik dan birokrasi Jepang mempunyai kaitan erat dengan strategi pemerintah dalam menjalankan *e-government*, yang fokus pada pemakaian teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh untuk meningkatkan performa serta standar pelayanan publik.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*). Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui berbagai sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi, laporan resmi pemerintah, serta publikasi lembaga terkait yang relevan dengan topik *e-government* di Indonesia dan Jepang. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menyeleksi literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, khususnya yang membahas implementasi *e-government*, birokrasi publik, serta tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif. Analisis dilakukan melalui beberapa

tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi sistematis untuk memudahkan proses perbandingan antara Indonesia dan Jepang. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan implementasi e-government di kedua negara.

Interpretasi data dilakukan dengan mengaitkan hasil analisis dengan konsep dan teori yang relevan, seperti teori good governance, digital governance, pelayanan publik, dan reformasi birokrasi. Proses ini bertujuan untuk memberikan pemaknaan yang lebih mendalam terhadap temuan penelitian sehingga dapat menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi yang berbeda guna memastikan konsistensi informasi. Sementara itu, reliabilitas penelitian dijaga melalui penggunaan sumber-sumber yang kredibel dan terkini serta proses analisis yang dilakukan secara sistematis dan transparan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Penerapan *E-government* di negara Indonesia**

Mengingat program *e-government* di Indonesia masih dalam periode awal, kita mustahil memastikan bahwa fungsi publik yang diberikan oleh birokrasi berjalan secara baik serta sesuai visi. Instrumen interaksi seumpama forum, surel, pesan, dan riset kini ada di jangkauan tangan Anda, dan informasi dapat ditemukan di berbagai alamat pemerintah. Namun, fakta memperlihatkan bahwa penyampaian pesan luar kurang berhasil. Indonesia masih menghadapi beragam rintangan dalam mempraktikkan *e-government*, terkait dengan sisi kapasitas personil, perangkat mesin, serta bentuk organisasi. Operasional *e-government* tidak berjalan maksimal dikarenakan saluran penghubung yang tersedia tidak dipergunakan secara mumpuni. Dalam lingkup layanan publik yang berlandaskan *e-government*, terlihat jelas bahwa perlu lebih banyak kepedulian pada desain kebijakan daripada hanya dalam eksekusi sistem semata (Nawir & Mukhlis, n.d.). Pembangunan e-government yang efektif memerlukan keselarasan antara strategi teknologi dengan kesiapan regulasi agar inovasi digital memiliki payung hukum yang kuat (Wanto, 2018)

Tantangan muncul di sektor infrastruktur dan teknologi disebabkan oleh kurangnya instansi pemerintah yang terhubung dengan jaringan lokal maupun global, serta keterbatasan dalam perangkat lunak dan perangkat keras. Dengan hadirnya *e-government*, instansi pemerintah perlu meningkatkan kemampuan komunikasi antar mereka secara

lebih efisien. Seringkali, pemerintah mempertanyakan sejauh mana *e-government* dapat efektif karena kendala organisasi yang dihadapi oleh agen saat berusaha mengimplementasikannya. Hierarki organisasi dan ketentuan birokrasi yang ketat menjadi penghambat vital dalam pengembangan sistem pelayanan publik yang baru melalui *e-government*.

Hambatan paling krusial dalam menyelenggarakan jasa publik yang berkualitas, dinilai dari dua dimensi, adalah standar layanan dan sistem birokrasi. Dewasa ini, sudah menjadi pemahaman kolektif bahwa setiap pemerintah di Indonesia memiliki hierarki birokrasi yang sangat berbelit serta tidak efektif. Menaikkan transparansi dan tanggung gugat instansi publik melalui publikasi informasi memanfaatkan teknologi merupakan salah satu metode untuk meminimalkan praktik korupsi. Salah satu moda di mana tata kelola digital merombak situasi yakni dengan memberikan kepada masyarakat lebih besar kuasa untuk terlibat dalam menyusun regulasi publik dan pengambilan keputusan. Selain itu, langkah ini diyakini akan meningkatkan produktivitas, merampingkan sistem birokrasi, serta mengakselerasi kemajuan ekonomi.

Faktanya, tidak seluruh kanal digital pemerintah daerah memuat rujukan mendalam. Beberapa dari situs tersebut hanya memuat aspek dasar seperti profil wilayah, batas-batas, potensi daerah, pariwisata, serta topik sejenis. Sayangnya, tidak seluruh platform memberikan kesempatan untuk menyuntikkan dana ke dalam layanan publik seperti infrastruktur jalan, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Di sisi lain, fungsi pencarian menjadi fitur yang sangat bermanfaat pada berbagai situs web daerah, khususnya yang dikelola oleh pemerintah lokal. Sebagian besar situs pemerintah daerah di Indonesia, kecuali beberapa kanal lelang elektronik, membutuhkan komunikasi manual untuk memproses layanan publik. Keberhasilan transformasi digital di tingkat daerah sangat bergantung pada digital leadership yang mampu menggerakkan aparatur untuk beradaptasi dengan perubahan sistem kerja (Sari, 2023). Terakhir, anomali yang terkait dengan daerah timbul ketika alamat resmi instansi tidak membagikan rincian anggaran bagi umum (Khoiriyanti & Rachman, n.d.). Laman seperti itu, yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia, cenderung menekankan aspek transaksi dibandingkan pemberian substansi. Hanya informasi yang berpola aktif atau transaksi yang dapat dibuka oleh masyarakat yang mampu didapat secara digital lewat kanal ini. Terjadi kelangkaan instrumen untuk memproses transaksi yang sulit serta rumit, semisal sistem pembayaran daring.

Tingkat pengungkapan finansial acapkali menempati posisi di bawah standar indeks laman web. Fenomena tersebut membuktikan urgensi berkelanjutan untuk memacu serta merealisasikan transformasi yang meningkatkan akuntabilitas dan transparansi mengenai

anggaran negara di Indonesia. Layanan publik yang bergantung pada teknologi informasi harus selalu dapat diandalkan, tanpa memperhatikan tempat atau keterbatasan waktu. Kebutuhan akan layanan yang konsisten seperti ini telah diatasi oleh perkembangan dalam teknologi informasi. Namun, untuk mencapainya, diperlukan pelaksanaan yang efisien dan tepat. Saat pemerintah Indonesia berupaya memetakan seberapa efektif mereka dalam menerapkan *e-government*, mereka harus melakukan penilaian. Evaluasi tingkat kematangan digital secara periodik sangat krusial untuk memetakan sejauh mana efektivitas birokrasi Indonesia dalam mencapai standar pelayanan publik internasional (Haoxing & System, n.d.) Langkah konkret bagi pemerintah ialah memeriksa peringkat *e-government*, yang kerap disingkat sebagai PeGI. Proyek ini akan diselenggarakan untuk melihat apakah *e-government* berhasil dioperasikan secara bermutu. Merespons transformasi teknologi yang kilat, realisasi PeGI sudah berlangsung sejak medio 2007. Bukan hanya bertindak sebagai media untuk mengkaji sistem elektronik, objektif primer PeGI adalah untuk menghadirkan regulasi bagi pengerjaan dan inovasi teknologi informasi di dalam tubuh birokrasi pemerintah negara. Upaya perlu dilakukan guna meningkatkan birokrasi dalam semua aspek: sistem, sumber daya manusia, kultur, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Efisiensi dan produktivitas layanan publik akan menjadi prioritas bagi Indonesia di hari depan lantaran negara ini mencoba melayani tuntutan rakyat. Kesimpulannya, dukungan diperlukan untuk infrastruktur e-pemerintah pusat dan wilayah Indonesia. Hal tersebut menjadi prosedur umum di Indonesia dalam membereskan birokrasi secara perlahan-lahan atau melalui tindakan yang berkelanjutan, demi meraih perubahan yang diinginkan, yakni *developing guidelines*. Ini bukan tugas ringan melihat otoritas masa kini bertransformasi menjadi birokrasi melalui jalur komunikasi serta teknologi informasi.

Jika diulas dibandingkan dengan Jepang, Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal keberhasilan penerapan *e-government*. Ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, termasuk kurangnya infrastruktur teknologi informasi yang merata, terutama di area pedesaan, rendahnya kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola sistem digital, dan budaya birokrasi yang masih cenderung kaku serta berhierarki. Di sisi lain, Jepang mencapai tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi karena didukung oleh infrastruktur teknologi yang canggih, integrasi sistem yang efisien, serta komitmen pemerintah untuk mendorong inovasi digital secara berkelanjutan. Selain itu, tingginya literasi digital di kalangan masyarakat Jepang ikut mempercepat penerapan layanan berbasis elektronik.

Perbedaan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap reformasi birokrasi di Indonesia, menandakan bahwa transformasi digital tidak hanya membutuhkan pengembangan teknologi, tetapi juga perubahan fundamental dalam aspek kelembagaan

dan sumber daya manusia. Integrasi layanan satu pintu secara digital harus mampu memangkas rantai birokrasi yang panjang guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah. (Amalia, 2018) . Reformasi birokrasi harus difokuskan pada penyederhanaan proses, peningkatan kemampuan aparatur, dan penguatan budaya kerja yang responsif terhadap teknologi. Hambatan utama dalam digitalisasi birokrasi bukan terletak pada ketersediaan perangkat, melainkan pada kesiapan mental aparat dalam meninggalkan pola kerja konvensional yang tertutup (Sharifi-Tehrani, 2025). Dengan cara ini, pelaksanaan e-government di Indonesia bisa menjadi lebih efektif dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam jangka panjang.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan e-government sangat terkait dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi warga dalam administrasi pemerintahan. Dalam hal ini, Jepang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan lebih efektif melalui sistem digital yang saling terhubung dan transparan, sementara Indonesia masih berjuang dengan tantangan untuk mencapai tata kelola yang akuntabel dan efisien. Melihat dari perspektif digital governance, keberhasilan e-government tidak hanya bergantung pada adanya teknologi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk mengintegrasikan teknologi itu ke dalam proses pengambilan keputusan dan layanan publik secara menyeluruh. Jepang menunjukkan kemajuan dalam aspek ini, sedangkan Indonesia masih dalam tahap pengembangan.

Selanjutnya, berdasarkan kerangka teori pelayanan publik, pelaksanaan e-government seharusnya difokuskan pada peningkatan mutu layanan, kemudahan akses, dan kepuasan masyarakat. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip itu karena adanya birokrasi yang rumit dan kurang responsif, sedangkan Jepang telah berhasil memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari perspektif reformasi birokrasi, hasil ini menunjukkan bahwa transformasi digital harus disertai dengan perubahan struktur dan budaya dalam birokrasi. Reformasi tidak hanya sebatas pada digitalisasi layanan, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas pegawai, penyederhanaan proses, serta penguatan budaya kerja yang responsif terhadap inovasi. Dengan demikian, keberhasilan e-government merupakan cerminan dari penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, digitalisasi yang terintegrasi, dan reformasi birokrasi yang berkesinambungan.

### **Penerapan *E-government* di negara Jepang**

Meningkatkan mutu layanan pemerintah kepada semua pemangku kepentingan melalui perluasan dan adopsi *e-government* dalam suatu negara dapat secara drastis mengurangi total pengeluaran yang dihabiskan untuk operasional administratif, hubungan, dan interaksi. Pengeluaran itu sangat vital dalam melayani tuntutan rutin pemerintah atau pemangku kepentingan. Lebih lanjut, (Opat et al., 2022) pemakaian teknologi informasi oleh departemen pemerintah (seperti Wide Area Network, Internet, dan Mobile Computing) yang dapat mengganti cara berinteraksi dengan firma serta divisi pemerintah lainnya dikenal sebagai "*e-government*," seturut The World Bank Group.

Yang pertama dan paling penting di antara agenda *e-government* yang diutamakan oleh kabinet negeri Jepang tahun 2002 mencakup poin berikut: 1) jaringan Internet yang kuat dan tinggi; 2) sistem pendidikan; 3) sistem digital dalam pengaturan pemerintah; serta 4) sistem percukaian dalam talian. Jepang dikenali kerana sektor telekomunikasinya yang pesat berkembang. Oleh itu, pengembangan akses internet menjadi fokus utama bagi kerajaan Jepang. Ini membolehkan pembinaan dan pelaksanaan sistem e-pemerintahan melalui penggunaan internet berkelajuan tinggi, hasil daripada penyebaran kabel fiber optik yang menyeluruh ke tiap negara.

Diresmikan pada tahun 2008 di Kagoshima, "Kizuna" Satelit Eksperimental menjadi satelit transmisi internet terancang di Jepang. Rencana tersebut menjadi buah kolaborasi antara Japan Space Exploration Agency (JAXA) dan National Institute of Information and Communications Technology, guna merancang jejaring internet berkecepatan tinggi. Satelit ini membawa pembaharuan yang modern dalam penciptaan skema komunikasi internet nirkabel dengan bermacam kelebihan, dirancang khusus untuk area Asia-Pasifik. Jepang memiliki kelebihan dalam mempraktikkan *e-government*, berkat kecepatan hantar data Kizuna yang sampai 1,2 gigabit per detik. Pihak Jepang memberikan proteksi kepada warganya melalui layanan e-pemerintah yang mencakup bimbingan medis jarak jauh, Efektivitas sistem di Jepang membuktikan bahwa nilai publik dari *e-government* tercapai ketika teknologi mampu merespons kebutuhan spesifik masyarakat secara cepat dan akurat yang dimungkinkan oleh kilatnya transfer data yang luar biasa (Twizeyimana & Andersson, 2019). Layanan ini sangat berhubungan erat dengan aplikasi internet berkecepatan tinggi. Sebagai bagian dari rencana *e-government*, kabinet Jepang juga bertindak responsif dalam merombak sistem pendidikan demi memberikan pelayanan yang lebih bagus kepada pelajar baik dalam negeri maupun internasional.

## Simpulan

Berdasarkan analisis perbandingan dalam studi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam posisi e-government global, efektivitasnya masih jauh tertinggal dari Jepang akibat perbedaan mendalam dalam infrastruktur digital, budaya birokrasi yang kaku, dan rendahnya tingkat literasi digital serta kualitas sumber daya manusia. Temuan ini memiliki implikasi penting yang menunjukkan bahwa transformasi digital tidak akan berjalan dengan baik hanya dengan membeli teknologi, tetapi juga harus diimbangi dengan reformasi birokrasi yang mendasar yang mencakup penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi anggaran, dan integrasi sistem layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kedepannya, Indonesia harus mengadopsi model citizen-centric yang berfokus pada pengalaman pengguna sebagaimana yang telah sukses diimplementasikan oleh pemerintah Jepang (Redha et al., 2025). Sebagai Transformasi birokrasi melalui jalur digital pada akhirnya harus bermuara pada perubahan sikap masyarakat yang lebih positif terhadap kinerja dan akuntabilitas pemerintah (West, 2004). Saran praktis, pemerintah Indonesia sebaiknya mempercepat distribusi infrastruktur TIK di daerah pedesaan dan meningkatkan keterampilan teknis pegawai negeri agar dapat beradaptasi dengan inovasi digital. Untuk penelitian di masa mendatang, disarankan agar dilakukan studi yang lebih mendalam mengenai strategi perubahan budaya organisasi dalam konteks birokrasi serta analisis biaya-manfaat dari penerapan teknologi tertentu seperti cloud computing atau satelit berkecepatan tinggi untuk mempercepat akses layanan publik.

## Referensi

- Agung, A., & Satia, G. (2020). Research in Business & Social Science The implementation of e-government in Indonesia. 9(7), 190–196.
- Amalia, E. (2018). Tantangan dan Isu-Isu E-Government Indonesia Dilihat dari Layanan untuk Masyarakat. 2(2).
- Ayu, K., Aryanti, F., Sukarsa, I. M., Agung, A., & Hary, N. (2022). The Study of E-Government Implementation in Indonesia. 10(1), 1–11.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>

- Caplanova, A., & Dimelis, S. (2025). the Digital Performance and Competitiveness of Public Sector Institutions in Southeast Asia. *Journal of Competitiveness*, 17(1), 101–126. <https://doi.org/10.7441/joc.2025.01.06>
- CHESSYA TIVANI WIJAYA. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM PADA PUSAT DATA NASIONAL TERHADAP KEJAHATAN PERETASAN DATA.
- Firdausijah, R. T., & Priatna, A. (2020). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK. 11, 113–119.
- Haoxing, Z., & System, C. (n.d.). Tinjauan Strategis Keamanan Siber Indonesia.
- Kasus, S., Pelayanan, M. A. L., & Kabupaten, P. (2020). PERANAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK. 11(2).
- Khoiriyanti, D., & Rachman, S. A. (n.d.). PEBANDINGAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA DENGAN SINGAPURA ( STUDI KASUS PELAKSANAAN E- GOVERNMENT ). 12(01), 38–51.
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional E-government: A four stage model. *Government Information Quarterly*, 18(2), 122–136. [https://doi.org/10.1016/S0740-624X\(01\)00066-1](https://doi.org/10.1016/S0740-624X(01)00066-1)
- Nawir, A., & Mukhlis, S. (n.d.). Analisis Transformasi Birokrasi Melalui Pengembangan e-Government di Indonesia. 1, 84–91. <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>
- Nurlukman, A. D. (2017). e-Procurement : Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis e-Government di Indonesia. 1(1), 81–93.
- Ode Muhammad Ichwan Sjachrawy, L., Thasman, T., Satyadharma, M., Susanti, N., & Hado, H. (2025). Transformasi Birokrasi melalui Inovasi Pelayanan Publik: Kajian Literatur tentang Reformasi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 5(1), 37–52. <https://doi.org/10.51454/z7ysp660>
- Opat, J. S., Andita, C., Ardelia, F., Junaidi, D. R., & Rahman, M. F. (2022). Saraq Opat : Jurnal Administrasi Publik PERBANDINGAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT ANTARA. 4(2), 84–93.
- Ramadhan, D., Furqaan, A., Rayyan, N., Setiawan, I., Ibrahim, A., Informasi, J. S., Komputer, F. I., & Sriwijaya, U. (2019). ANALISIS PEMANFAATAN E-

GOVERNMENT SEBAGAI MEDIA PELAYANAN. 5(1), 16–21.

Redha, M. R. M., Sumarno, D. A., & Alimudin, A. (2025). Transformasi Digital Layanan Publik di Kota Batam : Tantangan dan Peluang Menuju Tata Kelola Berkelanjutan. *Dialektika Publik*, 11–18.

Saputra, B. W., & Infrastructure, E. I. T. (2020). Pengembangan konsep e-government berbasis cloud computing pada kabupaten banyuasin tesis.

Sari, M. P. (2023). Digital Leadership Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Musrenbang Kota Bandar Lampung). 19. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/70201%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/70201/2/3>. TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Sharifi-Tehrani, M. (2025). Systematic Literature Review. *Encyclopedia of Tourism*, September 2025, 1028–1029. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-74923-1\\_911](https://doi.org/10.1007/978-3-030-74923-1_911)

Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of E-Government – A literature review. *Government Information Quarterly*, 36(2), 167–178. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001>

Wanto, A. H. (2018). Analisis Data Interaktif. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 39.

West, D. M. (2004). E-Government and the Transformation of Service Delivery and Citizen Attitudes. *Public Administration Review*, 64(1), 15–27. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2004.00343.x>